



Shelter Jangan Hanya Layani Warga Sewilayah

YOGYA (KR) - Sepekan terakhir kasus harian yang terkonfirmasi positif Covid-19 di DIY melonjak tajam. Ini perlu diantisipasi serius. Mulai dari tracing, testing maupun penanganan harus disiapkan sebaik-baiknya.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta mengatakan, adanya shelter atau isoter sangat penting saat ini untuk mencegah penyebaran kasus. Terutama untuk penanganan gejala ringan dan agar rumah sakit tidak penuh.

"Kita sudah belajar banyak saat gelombang kedua varian delta kemarin. Semestinya saat ini penanganan jauh lebih siap dan baik. Korban jiwa dan penyebaran harus diusahakan seminimal mungkin. Dengan kasus harian yang sudah di atas 2.500 ini beberapa shelter yang diselenggarakan

Pemda DIY sudah mulai penuh," ujarnya, Jumat (25/2).

Dicontohkan shelter Hotel Mutiara. Tidak sampai seminggu sejak dibuka sudah penuh. Shelter yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota juga sudah mulai dibuka. Bahkan beberapa pemerintah kalurahan maupun kampus juga sudah persiapan mengaktifkan kembali shelter isoter.

Sebagai catatan, DPRD DIY minta agar shelter/isoter yang di wilayah DIY bisa melayani warga lintas wilayah. Jangan hanya bisa melayani warga ber-KTP setempat. Isoter Hotel Mutia-

ra yang dikelola Dinsos DIY bisa menjadi contoh baik. Warga dari berbagai wilayah di Indonesia yang memerlukan isolasi dilayani secara baik, tidak memandang harus KTP DIY.

"Karena saya mendapatkan laporan dari lapangan. Ada Pemkab yang rencana membuka shelter kerja sama dengan salah satu kampus. Tapi hanya mau membiayai warga KTP kabupaten tersebut. Ini logika yang keliru dan harus diluruskan," jelasnya.

Huda menjelaskan, masyarakat yang tinggal di DIY berasal dari seluruh Indonesia. Apalagi ekonomi DIY ini, 60 persen lebih bergantung dari sektor wisata dan mahasiswa di berbagai kampus. Jika sektor wisata dan kampus ini surut, ekonomi otomatis tu-

run. Sebagaimana kemarin saat pppm level 4 ketika varian delta menyerang DIY pertumbuhan ekonomi DIY langsung anjlok.

"Intinya keberhasilan menangani pandemi ini menjadi kunci berbagai sektor di DIY. Jika kita membedakan pelayanan akan timbul masalah yang lebih besar. Misalnya jika mahasiswa luar DIY positif, tidak dilayani di isoter atau shelter karena bukan KTP kabupaten tersebut. Dia akan berpotensi menularkan ke kos-kosan dan warga sekitarnya, sehingga kasus jadi membesar," urainya.

Atau juga wisatawan yang perlu isolasi, tapi tidak dilayani karena bukan KTP wilayahnya maka berpotensi menularkan secara luas. DIY ini multi etnis, Indonesia mini maka seluruh war-

ga mesti dilayani secara baik. WNA pun tetap harus dilayani jika membutuhkan isolasi terpadu.

Pihaknya tidak melihat ada pelanggaran aturan hukum jika suatu kabupaten memfasilitasi isoter atau shelter warga yang ber-KTP luar. Ini adalah bencana dan siapa yang positif Covid-19 tidak bisa direncanakan. Dana yang digunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang sudah ada aturan mainnya. Kecuali jika ada kabupaten/kota yang tidak mampu memfasilitasi karena keterbatasan atau irit anggaran.

Jika ada Pemkab yang tidak mampu biayai isoter untuk warga KTP luar kabupaten/kotanya, silakan berkoordinasi dengan pemda DIY, ajukan permintaan bantuan. (Awh)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
3. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 27 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005